

LEMBAGA KEUANGAN MIKRO DALAM KERANGKA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MISKIN¹ Nani Zulminarni²

Sebagian besar penduduk miskin di Indonesia adalah perempuan, dan tidak kurang dari 6 juta mereka adalah kepala rumah tangga miskin dengan pendapatan rata-rata dibawah 10,000 per hari. Untuk menjaga kelangsungan hidup diri dan keluarga, umumnya mereka bekerja pada sektor informal—perdagangan dan jasa, sektor pertanian—buruh tani, dan buruh pabrik. Mereka sulit mendapatkan akses sumberdaya termasuk sumberdaya keuangan seperti kredit dari lembaga keuangan yang ada karena dianggap tidak layak, lokasi terpencil, tidak ada penjamin, yang sebagian persoalan ini juga terkait dengan issue gender.

Dalam strategi bertahan selama ini mereka tergantung pada sumber-sumber keuangan alternatif seperti hibah program pengentasan kemiskinan baik yang dilakukan pemerintah maupun lembaga-lembaga sosial dan LSM, rentenir (bank keliling, bank titil, bank plecit, dsb), kerabat dan tetangga. Sebagai akibatnya, mereka menjadi tergantung, usaha tidak berkesinambungan, terjerat hutang, dan tetap dalam lingkaran kemiskinan.

Persoalan kemiskinan perempuan bukan hanya sekedar persoalan akses terhadap sumberdaya keuangan semata. Persoalan perempuan miskin adalah persoalan struktural dengan faktor penyebab dan kendala yang tidak tunggal. Ketimpangan gender dalam seluruh aspek kehidupan merupakan kondisi utama yang mengantarkan perempuan pada kemiskinan yang berkepanjangan. Oleh karena itu, upaya pemberdayaan perempuan menjadi kesepakatan dan agenda dunia sejak tahun 80 an.

Paling tidak ada lima aspek yang saling berhubungan yang harus diperhatikan dalam pemberdayaan perempuan yaitu, **kesejahteraan, akses sumberdaya, partisipasi, kesadaran kritis dan kontrol**. Apapun upaya yang akan dilakukan dalam memberdayakan perempuan, sudah semestinya mencakup kelima hal diatas, termasuk dalam pengembangan lembaga keuangan mikro sebagai salah satu sumber daya ekonomi bagi mereka.

Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita (PPSW) sebagai sebuah lembaga non pemerintah yang bekerja untuk pemberdayaan perempuan sejak 1986, telah memilih pengembangan kelompok swadaya dengan prinsip koperasi dan pengembangan koperasi sebagai salah satu strategi dan pintu masuk pemberdayaan kelompok perempuan miskin. Koperasi dipilih karena mempunyai prinsip-prinsip ekonomi dan sosial yang memungkinkan kelima aspek pemberdayaan diatas dapat dicakup.

¹ Disampaikan dalam acara workshop “Berbagi Pengetahuan dan Sumberdaya Keuangan Mikro di Indonesia”, yang diselenggarakan oleh GEMA PKM Indonesia dan BWTP, di Jakarta, 27 Agustus 2004.

² Ketua Badan Pengurus Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita (PPSW), Koordinator Nasional Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA).

Memfasilitasi perempuan miskin di satu wilayah untuk berkelompok dan mengembangkan kegiatan simpan pinjam di kelompoknya merupakan langkah awal yang dilakukan selama ini. Setiap kelompok menyepakati bersama berapa jumlah simpanan-simpanan yang harus mereka lakukan, bagaimana caranya, dan ketentuan-ketentuan lainnya. Mereka memang harus mulai dengan menyimpan, bukan meminjam. Hal ini untuk melatih mereka mengubah mental membelanjakan menjadi menabung, ketergantungan menjadi mandiri, serta rasa memiliki dan tanggung jawab yang tinggi terhadap keuangan kelompoknya. Pinjaman pertama hanya boleh dilakukan jika mereka telah menabung selama tiga bulan dengan jumlah pinjaman sebesar simpanannya untuk jangka waktu maksimal 10 bulan. Jumlah pinjaman dapat semakin ditingkatkan sesuai kebutuhan dan evaluasi bersama terhadap kedisiplinan yang bersangkutan dalam mengangsur pinjamannya. Bunga pinjaman, jasa, dan bagi hasil, ditetapkan bersama secara musyawarah. Setiap akhir tahun mereka akan melakukan rapat tahunan dan membagikan hasil usaha simpan pinjam mereka. Mereka juga memilih pengurus koperasi secara musyawarah. Pengelolaan keuangan dilakukan secara transparan dan penuh rasa saling percaya. Selain dari berbagai simpanan, sumber modal kelompok juga diperoleh dari hibah program pembangunan dan pinjaman berbunga lunak atau sistem bagi hasil dari lembaga pendamping.

Kelompok-kelompok yang telah berkembang, kemudian difasilitasi untuk membentuk koperasi-koperasi primer berbadan hukum di tingkat desa, agar mereka dapat memiliki akses sumberdaya yang lebih luas. Koperasi-koperasi dan kelompok-kelompok ini kemudian mendirikan koperasi sekunder berbadan hukum di tingkat wilayah atau nasional guna membuka akses mereka terhadap sumberdaya di tingkat yang lebih tinggi dengan jumlah yang lebih besar.

Hingga saat ini telah berkembang lebih dari 400 kelompok swadaya, 30 koperasi primer berbadan hukum dan 1 koperasi sekunder berbadan hukum, melayani lebih dari 12,000 rumah tangga miskin di wilayah-wilayah miskin di 10 provinsi (Nangro Aceh Darusalam, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara). Perputaran total modal yang dikelola telah lebih dari 1 milyar per bulannya, dengan tingkat pengembalian mencapai 98%.

Dalam kerangka pemberdayaan perempuan, pengembangan lembaga keuangan mikro dengan strategi ini telah membuka jalan bagi kelompok perempuan miskin untuk: **Meningkatkan kesejahteraan**; mereka dapat meminjam uang setiap saat dengan prosedur yang gampang, bunga yang murah, dan keuntungan akan kembali untuk mereka. Pinjaman dapat dipergunakan untuk pengembangan usaha, biaya sekolah anak, dan juga kebutuhan sehari-hari yang mendesak. Mereka juga terhindar dari rentenir yang selama ini menghantui mereka. **Membuka akses sumberdaya**; dengan berkelompok dan berkoperasi mereka diakui keberadaannya, dapat akses informasi, dapat mengakses berbagai sumberdaya termasuk dana, pendidikan dan pelatihan melalui berbagai program yang dikembangkan di wilayahnya. **Berpartisipasi secara aktif dalam berbagai aktivitas**; dalam kelompok mereka membangun kebersamaan, belajar mengambil

keputusan, belajar berorganisasi. Dengan demikian mereka dapat secara percaya diri terlibat aktif dalam wilayahnya untuk berbagai aktivitas. **Terbuka kesadaran kritis;** kelompok yang menerapkan prinsip terbuka dan demokratis menjadi tempat berlatih bagi anggotanya untuk melihat setiap persoalan secara lebih kritis dan mengungkapkan apa yang menjadi pemikiran mereka. Selain itu kesadaran kolektif terhadap posisi dan keberadaan mereka dalam masyarakat setara dengan yang lain juga terbangun seiring dengan terbangunnya keyakinan diri mereka. **Mempunyai kontrol terhadap diri dan berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat;** secara kolektif mereka kemudian dapat ikut mengontrol proses pengambilan keputusan dan alokasi sumberdaya dalam masyarakat karena mereka telah terbiasa dalam kelompoknya.

Selain itu, kelompok-kelompok ini juga telah memberikan dampak sosial yang positif dalam masyarakatnya karena mereka juga menyisihkan sebagian keuntungan simpan pinjam untuk kegiatan sosial seperti beasiswa anak sekolah, santunan bagi orang perempuan tua dan tidak mampu bekerja, korban bencana dan sebagainya.

Tantangan terbesar yang dihadapi dalam strategi ini adalah pergerakan yang lambat dan terbatas. Usaha-usaha individu dan kolektif yang dikembangkan sangat mikro dan terbatas pemasarannya. Selain itu kendala sosial kultural yang dihadapi perempuan masih menjadi faktor penghambat mereka untuk mengembangkan usaha ini. Misalnya beban ganda yang harus ditanggung pengelola lembaga seperti ini. Keterbatasan kapasitas perempuan yang umumnya berlatar belakang pendidikan rendah bahkan buta huruf menjadi kendala serius lainnya.

Namun demikian, berdasarkan perjalanan selama ini dapat diakui bahwa pendekatan ini merupakan salah satu pendekatan efektif untuk memberdayakan perempuan miskin dan berkontribusi pada proses pengentasan kemiskinan secara berkesinambungan.

LEMBAGA KEUANGAN MIKRO DALAM KERANGKA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MISKIN

MENGAPA PERLU?

- AKSES TERHADAP SUMBERDAYA KEUANGAN TERTUTUP
- PINJAMAN TERLALU KECIL--TIDAK LAYAK
- TIDAK ADA PENJAMIN
- LOKASI TERPENCIL
- ISUE GENDER

DARIMANA SUMBERDAYA KEUANGAN SELAMA INI?

- HIBAH PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN
- PROGRAM LSM
- RENTENIR
- KERABAT DAN TETANGGA

APA AKIBATNYA?

- KETERGANTUNGAN
- KETIDAKSINAMBUNGAN
- TERJERAT LINGKARAN HUTANG
- KEMISKINAN

DARIMANA HARUS MULAI?

- MENUMBUHKAN KELOMPOK-KELOMPOK SWADAYA
- MENGEMBANGKAN KEGIATAN SIMPAN PINJAM
- MENGEMBANGKAN KELOMPOK SIMPAN PINJAM MENJADI KOPERASI BERBADAN HUKUM
- MEMPERLUAS KEANGGOTAAN KOPERASI
- MENGEMBANGKAN KOPERASI SEKUNDER DI TINGKAT YANG LEBIH TINGGI

CONTOH YANG SUDAH ADA?

- LEBIH DARI 400 KELOMPOK SWADAYA
- 30 KOPERASI PRIMER BERBADAN HUKUM
- SATU KOPERASI SEKUNDER BERBADAN HUKUM
- SUMBER MODAL, SIMPANAN POKOK, SIMPANAN WAJIB, SIMPANAN SUKARELA, PINJAMAN DARI LUAR
- SISTEM BIAYA ADMINISTRASI, BUNGA DAN BAGI HASIL

PEMBERDAYAAN?

- KESEJAHTERAAN
- AKSES SUMBERDAYA
- PARTISIPASI
- KESADARAN KRITIS
- KONTROL

KEKUATAN?

- DIMILIKI, DIKELOLA, DAN DIKONTROL OLEH KELOMPOK PEREMPUAN MISKIN
- MERUPAKAN SARANA PEMBERDAYAAN BAGI MEREKA
- KEUNTUNGAN DIMANFAATKAN BERSAMA
- PENGEMBALIAN DIATAS 98%

TANTANGAN?

- PERKEMBANGAN LAMBAT
- BELUM MAMPU MENGAKSES BUNGA PASAR
- ISUE GENDER
- RENTAN